

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kementrian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI) adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tugas utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia salah satunya yaitu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dalam rangka terwujudnya Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang lebih maju.

Perjalanan Dinas dalam Negeri merupakan suatu kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Banyak tugas pokok Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pelaksanaannya sangat tergantung pada kelancaran proses Perjalanan Dinas dalam Negeri. Maka dari itu sangat diharapkan dengan adanya Perjalanan Dinas Dalam Negeri fungsi dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat terwujud dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang ada.

Perjalanan dinas sendiri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. Dalam hal ini, perjalanan dinas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pejabat/pegawai, termasuk untuk peningkatan kualitas SDM seperti mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan dalam negeri, perlu menyampaikan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri ini ditujukan

kepada pelaksana kegiatan seluruh Satuan Kerja selaku pihak yang merencanakan, membiayai, melaksanakan, mempertanggung jawabkan, mengawasi, mengevaluasi serta melaporkan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. Terdapat 2 jenis Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah, Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Sedangkan Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan 4 prinsip yaitu selektif yang hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi penggunaan belanja negara, akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas

Prinsip dasar ini digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang lalu dilaporkan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan perhitungan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibayar secara at cost sesuai dengan standart biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti perhitungan jumlah hari x tarif, perhitungan biaya angkutan, perhitungan biaya penginapan dan penjumlahan vertikal dan horizontal.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang dimana dibutuhkan beberapa proses yang bertujuan agar perjalanan dinas tersebut dapat terlaksana. Dengan latar belakang tersebut maka dalam Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada Kementrian Pekerjaan umum dan

Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, Penyusun tertarik untuk mengambil judul tugas akhir yaitu “Prosedur Atas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga”.

I.2 Ruang Lingkup

Ruanglingkup pembahasan dalam penulisan tugas akhir yang dilaksanakan mencakup proses atas prosedur perjalanan dinas dalam negeri dimana fokus pada praktek kerja lapangan yang dilakukan ini adalah prosedur atas perjalanan dinas pada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga

I.3.Tujuan

Berikut adalah beberapa tujuan penyusun dalam mengerjakan Tugas Akhir dan menjalankan Praktik Kerja Lapangan, berikut tujuannya :

a) Tujuan Umum

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga (D.III) pada jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sekaligus mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja sehingga meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang jurusan sistem informasi akuntansi dan akuntansi pemerintahan.

b) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu mengetahui alur Prosedur atas perjalanan dinas dalam negeri pada bagian hukum dan komunikasi publik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Bina Marga dan mengetahui lebih detail mengenai prosedur perjalanan dinas mulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan pertanggungjawaban.

I.4 Sejarah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut "Waterstaat swerken". Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep. Van Verkeer & Waterstaat (Dep. V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van Guoovernements Bedrijven dan Dept. Van Burgewrlijke Openbare Werken.

Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang Departemen ini. Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat, dengan onder afdelingen. : 1. Lands gebouwen, 2. Wegen, 3. Irrigatie & Assainering, 4. Water Kracht, 5. Constructie bureau (untuk jembatan).

Disamping yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga afd. Havenwezen (Pelabuhan), afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan) dan afd. Luchtvaart (Penerbangan Sipil). Organisasi P.U (Openbare werken) di daerah-daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Propinsi yang disebut : "Provinciale Waterstaatsdienst" dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdienst (H.P.W)
- 2) Di wilayah Gouv, Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (yogya) "Rijkswerken" (Surakarta), "Mangkunegaranwerken". Disamping itu di wilayah Vorstenland terdapat 3 organisasi "Waterschap", "s" Lands gebouwendienst, "Regentschap Werken" dan "Gemeente werken"
- 3) Untuk daerah luar Jawa Gouv. Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi "Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat" dikepalai oleh seorang Inspektur. Di wilayah Residentie terdapat "Residentie Water Staatsdienst" yang dahulu dikenal dengan nama "Dienst der B.O.W". dan kepala dinas ini biasa disebut "E.A.Q" (Eerst Aanwzende Waterstaatsambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan pada jaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam "A.W.R". 1936.

Jaman Jepang

Setelah Belanda menyerahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut.

Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi Jaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang, kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disamping "Doboku" lazim dipergunakan.

Kotubu Bunsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri.

Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Ned. Indie, disamping menurut sistem Jepang.

Jaman Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.

Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate").

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-

gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945").

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU.

Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
- 2) Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep.PU. RIS.

Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu :

- 1) Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).
- 2) Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw.
- 3) Departemen Van Scheepvaart.

Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan

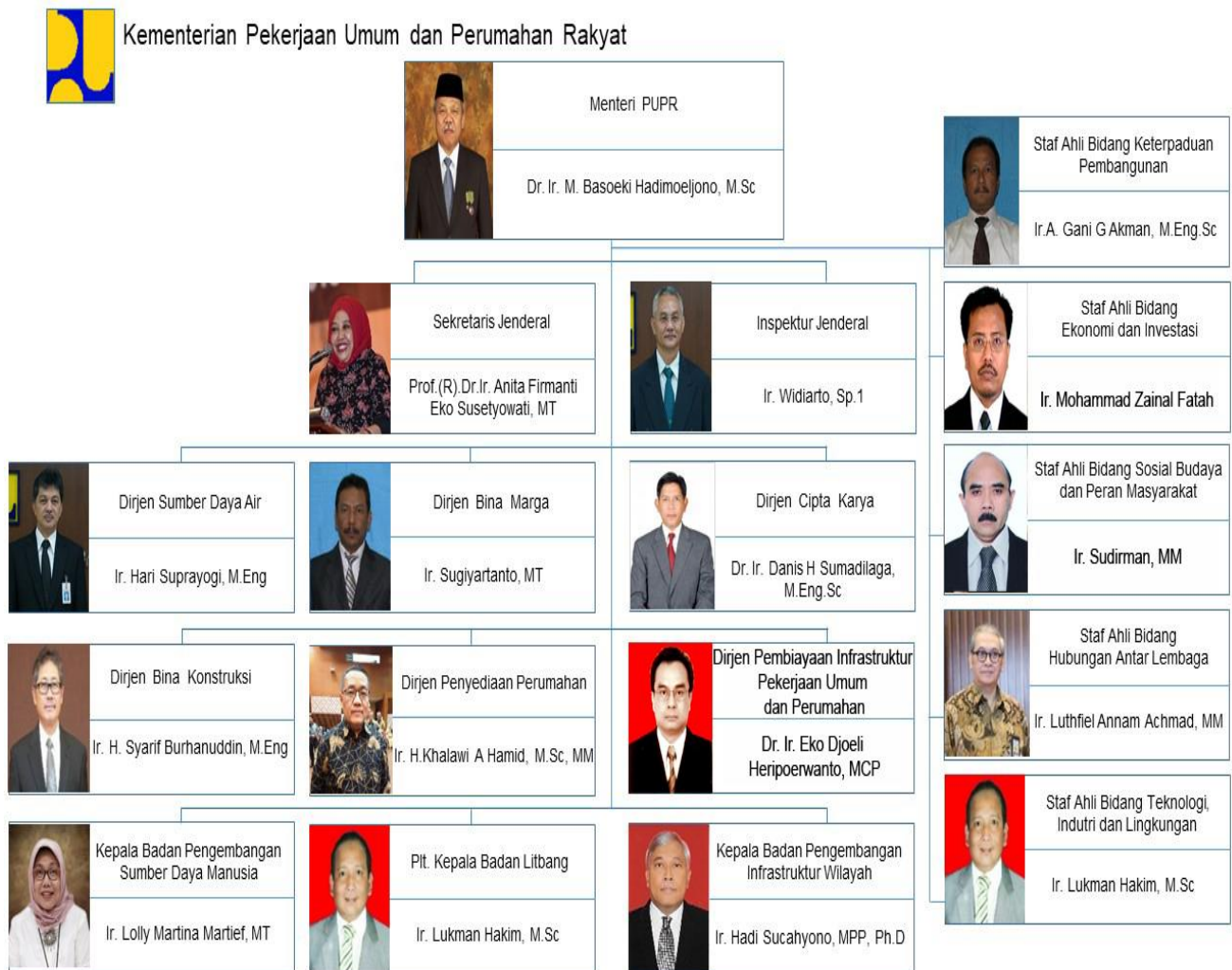
Kementerian berbeda sebagai berikut : Dalam masa proloog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain :

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan
2. Departemen Bina Marga
3. Departemen Cipta Karya Konstruksi
4. Departemen Pengairan Dasar
5. Departemen Jalan Raya Sumatera

Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diroboh dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.



Sumber: <https://www.pu.go.id/article/54/struktur-organisas>

Gambar 2. Struktur organisasi Kementerian PUPR

Departemen-departemen yang ada di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki fungsinya masing-masing termasuk Direktorat Jendral Bina Marga memiliki tugas pokok dan fungsi pokok mencakup :

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pokok :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun penulis ditempatkan di Direktorat Jenderal Bina Marga Divisi Hukum dan Komunikasi Publik yang merupakan bagian dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga.

Di bawah Sekretariat Direktorat jendral Bina Marga ada beberapa departemen, yaitu:

Sekretariat Direktorat Jenderal

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - Subbagian Tata Usaha Kepegawaian
 - Subbagian Pengembangan Pegawai
 - Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

- b. Bagian Keuangan dan Umum
 - Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan
 - Subbagian Verifikasi dan Pelaporan
 - Subbagian Umum
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
 - Subbagian Perundang-Undangan
 - Subbagian Advokasi Hukum
 - Subbagian Komunikasi Publik
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
 - Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara
 - Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara
 - Subbagian Leger Jalan

Kemudian untuk lingkup yang lebih kecil, berikut adalah uraian tugas pokok dan produk pokok di divisi-divisi yang ada di bawah Sekretariat Jendral Bina Marga

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :
Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga.
- b. Bagian Keuangan dan Umum
Tugas Pokok : Melaksanakan Pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga.
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan administrasidan akuntansi Barang Milik Negara, leger jalan nasional dan jalan tol
- d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hokum dan pemberian pertimbangan hokum serta penyelenggaraan komunikasi publik

I.6 Kegiatan Kementerian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.7 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu, kreatifitas, membangkitkan minat dan daya pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu yang didapat di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan Prosedur atas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Bina Marga.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melakukan perbandingan teori-teori yang di dapat selama proses pembelajaran di bangku kuliah dengan kegiatan yang dilakukan selama program magang berlangsung.

2) Bagi Universitas

Sebagai dasar atau acuan pembelajaran yang ditujukan untuk para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan kaitan masalah yang sama.